



PENETAPAN

Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PONITI Binti SAIMIN, NIK.3507274205700004, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Banu RT.007 RW. 002 Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Rini Laras Santi Binti Suwardi ;
Tanggal lahir : 14 Nopember 2002 (umur 18 tahun, 2 bulan) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Tempat kediaman di : Dusun Banu RT.007 RW. 002 Desa Banturejo
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Umar Bin Munawar ;
Tanggal lahir : 16 November 1996, (umur 24 tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta Tambal Ban ;
Tempat kediaman di : Dusun Bonjagung RT.009 RW. 003 Desa Pait
Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari B-10/Kua.13.35.11/Pw.01/1/2021 Tanggal 20 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Rini Laras Santi Binti Suwardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Umar Bin Munawar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sedang ayah anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lama meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengarahkan Anak Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **RINI LARAS SANTI Binti SUWARDI**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Banu RT.007 RW. 002 Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 14 Nopember 2002, dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Muhammad Umar, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Muhammad Umar) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma kehidupan di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah berhenti sekolah, Anak Pemohon telah lulus Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan saat ini kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu orang tua Anak Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Pemohon sudah belajar banyak kepada ibu Anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat ;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon juga sudah sering konsultasi dengan dokter/bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan Anak Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD UMAR Bin MUNAWAR**, Umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penambal Ban, bertempat kediaman di Dusun Bonjagung RT.009 RW. 003 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Rini Laras Santi binti Suwardi dengan Calon Suami Anak Pemohon (Muhammad Umar), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Rini Laras Santi);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Calon Suami Anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat serta perundang-undangan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon dan keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan ;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kini bekerja sebagai tukang tambal ban dengan penghasilan perbulan berkisar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan untuk berumah tangga tersebut Calon Suami Anak Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta orang tua Calon Suami Anak Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ayah calon suami anak Pemohon bernama **MUNAWAR Bin MUNTOLIB**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambal Ban, tempat kediaman di Dusun Bonjagung RT.009 RW. 003 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ayah calon suami anak Pemohon atau wakil calon besan Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Rini Laras Santi dengan Anak Calon Besan Pemohon bernama Muhammad Umar, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut sangat dikhawatirkan terjadi pada diri mereka akan hal hal yang melanggar

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama, perundang-undangan dan norma susila yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Ayah Calon Besan Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Pemohon dengan Anak Calon Besan Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon/wakil Calon Besan Pemohon mengetahui, saat ini anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai tukang tambal ban dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan kemenakannya dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka berdua menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507274205700004, atas nama Poniti, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan, Nomor B.11/Kua.13.35.10/Pw.01/1/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.2);

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507273009090002, tanggal 03 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 475/21/429.520.209/IV/2003, atas nama Rini Laras Santi, tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 470/36/01/35.07.28.2003/2021, atas nama Muhammad Umar, tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor DN-Dp/06 2365797, atas nama Rini Laras Santi, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), Nomor DN-05 Dd 0294295, atas nama Muhammad Umar, tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Pait 02 Kasembon Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.7);
- h. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan, Nomor B-10/Kua.13.35.11/PW.01/1/2021, tanggal 20 Januari 2021ng dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);
- i. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-11/Kua.13.35.11/PW.01/1/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/0089/35.07.103.101/2021, atas nama Rini Laras Santi, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kasembon, bermeterai cukup, (bukti P.10);

- k. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/0090/35.07.103.101/2021, atas nama Moch. Umar, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kasembon, bermeterai cukup, (bukti P.11);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah lama tidak diketahui alamat keberadaannya secara pasti dan jelas hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Ayah Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Ayah Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.8, P.9, P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniti memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa asli Surat Keterangan dan fotokopi Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suwardi dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Rini Laras Santi yang sekarang oleh Pemohon dimohonkan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P. 5 adalah berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Rini Laras Santi dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mohammad Umar memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin (Rini Laras Santi), lahir tanggal 14 Nopember 2002 atau saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, sedang Calon Suami Anak

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Mohammad Umar) lahir tanggal 16 Nopember 1996 atau saat ini telah berusia 24 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rini Laras Santi dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Umar memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berpendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama, sedang Calon Suami Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan dan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rini Laras Santi dan asli Surat Keterangan Sehat atas nama Moch. Umar memberi bukti kondisi psikologis dan kesehatan bahwa Anak Pemohon/anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Ayah Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Rini Laras Santi Binti Suwardi, umur 18 tahun, 2 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Umar Bin Munawar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika mereka berdua menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

ج

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rini Laras Santi Binti Suwardi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Umar Bin Munawar ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **03 Pebruari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
Jumlah	:	Rp.	317.000,-

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg